

ANALISIS VIDEO

**Berjudul : Demokrasi itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut
Banyak Negara?**

Mata Kuliah : MKU Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.
2. Drs. Rapani, M.Pd.



Nama : Nadia Mela Wulandari

NPM : 2413053183

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

“Yang terpenting dalam situasi seperti ini. Jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan.” Pernyataan Bapak Jokowi pada tanggal 03 Oktober 2022 terkait penanganan pandemi di Indonesia dinilai mustahil untuk dilakukan dalam negara demokrasi. Penyebabnya karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat dan menjamin kebebasan dalam berpendapat. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Bapak Adi Prayitno juga mengatakan, “Demokrasi itu pasti bising. Demokrasi itu pasti berisik. Demokrasi adalah tempat orang berisik. Tempat orang ribut. Yang terpenting ributnya masih dalam koridor demokrasi yang prosedural, saya kira tidak masalah.” Hal ini berarti bahwa negara demokrasi akan membuat perbedaan pendapat yang berujung pada konflik dan kerusuhan.

Meskipun begitu, negara yang mampu menjalankan demokrasi yang baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran angka panjang. Demokrasi juga dipandang lebih efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Warga dalam negara demokrasi juga memiliki angka harapan hidup lebih tinggi. Sejak 1980-an negara yang menganut demokrasi meningkat secara pesat sedangkan rezim autokrasi banyak yang berjatuh.

Namun, bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna. Demokrasi kerap menghasilkan pemimpin-pemimpin populis yang anti-sains dan politikus yang anti kritik. Hal ini terjadi akibat memberikan hak pilih pada masyarakat yang kurang mengerti persoalan dengan baik.

Beberapa analisis mengatakan bahwa demokrasi berada dalam fase krisis. Alasannya, mulai dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan. Winston Churchill, seorang mantan perdana menteri Inggris mengatakan, “Demokrasi adalah sistem pemerintah yang paling buruk tapi tidak ada yang lebih baik daripada itu.”